

BAB III

TINJAUAN HAK CIPTA

A. Sejarah Haki

Hak atas kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial).³⁴ Dilihat dari sejarah lahirnya hak atas kekayaan intelektual, ternyata hak ini masih belum lama memperoleh perlindungan hukum, baik pengaturannya di Negara-negara maju maupun di Negara berkembang.³⁵ Dibandingkan dengan hak pada benda yang berwujud perlindungan hukum hak kekayaan intelektual belumlah lama diakui. Di Eropa diakui hak atas kekayaan intelektual secara internasional baru diperkenalkan pada abad ke 18. Pada abad ke-18 di Inggris mulai timbul pengertian si pencipta harus dipandang sebagai yang berhak atas karyanya sendiri.³⁶ Sedangkan di Perancis barulah diakui hak-hak para *author* setelah dikeluarkannya Undang-undang Hak Cipta Tahun 1791.

Perhatian Negara-negara untuk mengadakan kerjasama mengenai masalah hak milik intelektual secara formal telah ada sejak akhir abad ke-19 yang dicetuskan ke dalam perjanjian-perjanjian internasional. Sebagian besar perjanjian-perjanjian tersebut mengatur mengenai perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta. Perjanjian-perjanjian tersebut antara lain:

- World Intelektual Property Organization (WIPO)
- General Agreement on Tariff and Trade (GATT)

³⁴ OK Saidin, *Op. Cit.*, h.11

³⁵ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional : Dalam Kerangka Studi Analitis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) h.132

³⁶ *Ibid.*, h.133

- World Trade Organization (WTO)

1. World Intellectual Property Organization (WIPO)

WIPO didirikan berdasarkan konvensi yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 yang bernama *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* berlaku pada tahun 1970 dan menjadi badan khusus PBB pada bulan Desember 1974.³⁷

Menurut Konvensi WIPO yang termasuk ke dalam ruang lingkup IPR terdiri dari dua unsure, yaitu:³⁸

- a. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Right) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri.
- b. Hak cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, music fotografi dan sinematografi.

2. General Agreement on Tariff and Trade (GATT)

GATT merupakan suatu perjanjian perdagangan multilateral yang disepakati pada tahun 1948, dimana tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna tercapainya kesejahteraan umat manusia.³⁹ Perundingan GATT yang paling krusial membahas tentang HKI (TRIPs) adalah pada perundingan Uruguay mulai pada tahun 1986.

Masalah TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) menjadi penting, karena factor-faktor yang dapat mempengaruhi perdagangan

³⁷ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) h.7

³⁸ *Ibid.*, h.8

³⁹ Syahmin AK, *Op. Cit.*, h.41

internasional telah berkembang semakin kompleks dan bervariasi, sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat.⁴⁰ Putaran Uruguay ternyata menjadi, terpanjang paling rumit, dan yang terakhir dari putaran GATT. Butuh waktu tujuh setengah tahun untuk menyelesaikannya, dan itu menyebabkan reformasi paling mendasar dari aturan perdagangan dunia sejak GATT itu sendiri diciptakan pada 1948. Negosiasi yang berawal di Uruguay 1986 ini disimpulkan pada 1994 dengan ditandatanganinya Uruguay Round Agreement pada Marrakesh Ministerial Meeting. Perjanjian ini kemudian menjadi dasar pembentukan WTO.

3. World Trade Organization (WTO)

WTO adalah sebuah organisasi internasional yang dirancang oleh pendiri perusahaan untuk mengawasi dan liberalisasi perdagangan internasional. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antarnegara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya.

WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 tetapi sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun

⁴⁰ Taryana Soenandar, *Op. cit.*, h.11

1948, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948-1994 sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi. Organisasi perdangan dunia (WTO) memiliki status sebagai organ khusus PBB seperti halnya IMF (International Monetary Fund) dan IBRD (International Bank for Reconstructuries and Development).⁴¹

Indonesia merupakan salah satu neegara yang telah meratifikasi pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.⁴² Dikarenakan hal tersebut Indonesia berkewajiban menyesuaikan peraturan perundangan-undangan nasional dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs-WTO).

TRIPs-WTO bertujuan antara lain:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produk-produk yang diperdagangkan;
2. Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI;

⁴¹ Syahmin AK, *Op. Cit.*, h.51

⁴² Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005) h.1

4. Mengembangkan prinsip-prinsip aturan dan mekanisme kerjasama Internasional untuk menangani kasus-kasus perdagangan barang-barang hasil pemalsuan dan pembajakan.

TRIPs sebagai persetujuan Internasional di bidang HKI pada dasarnya tidak terlepas dari persetujuan-persetujuan yang telah ada sebelumnya, seperti Paris Convention (1971) tentang perlindungan terhadap karya tulis dan seni, yang tertuang dalam akta paris dari Konvensi Paris tersebut tanggal 14 Juli 1971. Konvensi Roma yaitu konvensi Internasional mengenai Perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman musik dan organisasi siaran yang disepakati di Roma tanggal 26 Oktober 1961. Selain itu, terdapat traktat HKI atas Integrated Circuits yang di kenal dengan IPIC Treaty yang disepakati di Washington 25 Mei 1989. Berlakunya TRIPs secara efektif dinyatakan tanggal 1 Januari 1995 dan bagi negara-negara berkembang diberi waktu masa peralihan selama lima tahun. Dengan demikian, bagi negara-negara berkembang akan berlaku 1 Januari 2001.

B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.⁴³ Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan sastra. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intelektual Property Right* (IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul kerana kemampuan

⁴³ Subroto, Muhammad Ahkam, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2005) h.11

intelektual manusia. IPR sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut “*Intelektual Property Right*”.⁴⁴

Dalam istilah HKI terdapat tiga unsur penting yakni, (1) hak, (2) kekayaan, dan (3) intelektual. Ketiga unsur ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama unsur hak, hak yang dimaksud disini adalah hak yang diberikan kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya yang eksklusif.⁴⁵ Hasil karya yang diciptakan haruslah baru, bernilai ekonomis, dan dapat diterapkan.

Kedua unsur kekayaan. Menurut van Apeldoorn dalam bukunya pengantar ilmu hukum menjelaskan bahwa hukum kebendaan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan.⁴⁶ Unsur kekayaan pada hak kekayaan intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialikan secara komersial. Menurut ilmu pengetahuan hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.

Ketiga, unsur intelektual. Intelektual adalah cerdas, orang yang berfikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Seorang intelektual adalah orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan memiliki sikap hidup terus

⁴⁴ Afrillyanna Purba, dkk, *Op. Cit.*, h.12

⁴⁵ Venantia Sri Hadiaranti, *Op.Cit.*, h.13

⁴⁶ *Ibid.*, h.16

menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu.

Dari ketiga pemahaman itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Melahirkan sebuah karya memerlukan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya, menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai.

HKI secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industry. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industry adalah dalam bidang teknologi.

HKI yang berupa hak kekayaan industry meliputi hak atas:⁴⁷

- Paten dan Paten Sederhana
- Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
- Desain Industri (*Industrial Design*)
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

C. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Setiap negara memiliki sistem hukum masing-masing. Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda dikenal sebagai negara yang menganut

⁴⁷ Iswi Haryani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) h.18

sistem hukum Eropa Kontinental atau juga disebut dengan European Continental Legal Sistem. Sedangkan sistem hukum Anglo Saxon atau disebut juga dengan Common Law Sistem dianut oleh negara Inggris dan negara-negara bekas jajahan Inggris. Istilah *system* berasal dari bahasa Yunani '*systema*' yang berarti suatu keseluruhan yang terdiri dari sekian banyak bagian.⁴⁸ Jika dikaitkan dengan kata hukum yang menjadi frasa 'sistem hukum' dapat dimaknai sebagai suatu keseluruhan yang terangkai (yang mencakup aspek substansi, struktur dan kultur) yang terdiri atas komponen-komponen dimana antara komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan dan apabila salah satu komponen terpengaruh akan mempengaruhi keseimbangan *system* hukum secara keseluruhan.

Hukum sebagai suatu *system* menurut Friedman, adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen sebagai berikut:⁴⁹

- a. *Substantif* (norma/kaidah, asas hukum)
- b. *Structure* (struktur hukum)
- c. *Culture* (budaya hukum)

Diskursus mengenai suatu bidang ilmu hukum secara khusus, seperti hukum hak kekayaan intelektual (HKI), maka bidang hukum yang *relative* masih baru di Negara Indonesia yang juga memiliki sistem hukum tersendiri yang tujuannya adalah memberikan perlindungan (*legal protection*) kepada karya intelektual manusia, baik itu dalam bidang hak cipta dan hak-hak terkait,

⁴⁸ OK Saidin, *Op. Cit.*, h.19

⁴⁹ *Ibid.*, h.21

paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Dalam bidang hak kekayaan intelektual, sistem hukum yang berkembang di masing-masing Negara, termasuk juga di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh hukum internasional dan juga oleh hukum Negara Negara-negara lain. Hal ini tidak bisa dinafikan, karena bagaimanapun juga sistem hukum internasional yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual lebih duluan lahir dan berkembang secara dinamis dan progresif dibandingkan dengan hukum nasional.

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914.

Setelah masa kemerdekaan sampai saat ini Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur HKI, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding Paten
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penanaman, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat & Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding Merek.

D. Hak Cipta

1. Pengertian Hak cipta

Secara yuridis istilah hak cipta telah dipergunakan dalam UUHC No.6 Tahun 1982, UUHC No.7 Tahun 1987, UUHC No. 12 Tahun 1997 dan UUHC No. 19 Tahun 2002. Sebagai istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet1912. Pengertian Hak cipta, diatur dalam pasal 1 butir 1 UUHC No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya oleh *The Berne Copyright Convention and Universal Copyright Convention* menyebutkan bahwa: Hak cipta meliputi Hak Tunggal dari si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari pada karya yang dilindungi perjanjian ini.⁵⁰ Sebagai salah satu negara yang menandatangani konvensi internasional tentang hak cipta ciptaan-ciptaan yang berasal dari negara-negara penandatanganan the Berne Copyright Convention dilindungi di Indonesia.⁵¹

⁵⁰ OK Saidin, *Loc. Cit.*

⁵¹ Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Univ. Atmajaya, 2009) h.36

Hak cipta merupakan istilah populer di dalam masyarakat. Walaupun pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbeda tingkat pemahaman tentang istilah itu. Akibatnya di dalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman didalam member arti sehingga menimbulkan kerancuan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam masyarakat istilah hak cipta ini sering dikacaukan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan merek. Seolah-olah pengertian hak cipta cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia.

Pengertian hak cipta itu sendiri terdiri dari dua kata 'hak' dan 'cipta'. Kata 'hak' yang sering dihadapkan dengan kata 'kewajiban' adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata 'cipta' tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Untuk kebutuhan praktis, upaya memahami hak cipta dapat diawali dengan mengenali objeknya, yaitu segala bentuk ciptaan yang bermuatan ilmu pengetahuan, berbudaya seni, dan bernuansa sastra.⁵²

Pengertian hak cipta sebagaimana kita kenal sekarang, tidak dapat lepas dari perkembangan sejarahnya. Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh dalam perkembangan hak cipta adalah faktor sosial, ekonomi, politik dan teknologi, dimana ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh

⁵² Hendri Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.46

terhadap perkembangan hak cipta yang bertujuan untuk melindungi para pencetus atau pencipta. Dalam rumusan undang-undang mengenai pengertian hak cipta dalam hal ini didasarkan pada Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta yang sebagaimana telah diubah dari Undang-undang No. 12 Tahun 1997 yang sebelumnya diubah dari Undang-undang No. 7 Tahun 1987 yang juga telah diubah sebelumnya dari Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Berdasarkan pengertian hak cipta pada UUHC dapat kita garis bawahi terutama pada kalimat bahwa ‘hak cipta adalah hak khusus bagi penciptanya’ yang berarti bahwa hak ini hanya diperuntukkan bagi para penciptanya dan bagi mereka yang memperoleh daripadanya. Tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu atau orang lain hanya dapat melakukan atas izin pencipta. Istilah ‘hak khusus’ dipakai untuk menerangkan bahwa hak cipta merupakan hak istimewa.

Kedua hak khusus tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang sesuai dengan penjelasan arti beberapa istilah tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Hak cipta, adalah sebagai berikut :

- (1) Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.⁵³

⁵³ Republik Indonesia, *Op.Cit.*, pasal 1 (4)

(2) Perbanyakan adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hamper sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan – bahan yang sama maupun tidak sama. Termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan.⁵⁴

2. Fungsi dan Sifat Hak cipta

Seperti halnya jenis-jenis hak lainnya dalam lingkup HKI, hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain.⁵⁵ Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar hak cipta, yakni:⁵⁶

- a. Yang dilindungi ciptaan adalah ide yang telah berwujud dan asli
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya
- c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum
- e. Hak cipta bukanlah hak mutlak.

Di dalam pasal 2 Undang-undang Hak Cipta 1982 yang diperbaharui dengan Undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 yang diperbaharui oleh Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dan kemudian

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 1 (5)

⁵⁵ Hendri Soelistyo, *Op. Citl.*, h.51

⁵⁶ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h.8

diperbaharui lagi oleh Undang-undang No.19 Tahun 2002, secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan serta memberi izin untuk itu harus memperlihatkan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Hal ini dimaksudkan agar setiap penggunaan dan memfungsikan Hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Yang tujuan utama pembatasan terhadap Hak cipta ini agar setiap orang dan badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Hak cipta mempunyai fungsi sosial, hal ini dapat kita lihat dengan jelas dari Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Didalam penggunaanya harus diperhatikan apakah hal itu tidak bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Didalam pasal 2 Undang-undang Hak cipta 1982 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Cipta 1987 yang juga telah diperbaharui oleh Undang-undang 1997 dan telah diperbaharui oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dikatakan bahwa Hak cipta itu merupakan hak khusus, dimana tidak ada yang berhak atas hak tersebut kecuali pencipta itu sendiri ataupun orang lain dengan izin dari penciptanya.

Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa hak individu itu dihormati namun pada penggunaanya tetap harus memperhatikan kepentingan umum. Kepentingan – kepentingan tersebut antara lain;

- kepentingan pendidikan,
- ilmu pengetahuan, dan

- kegiatan penelitian dan pengembangan.

Apabila Negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya

Mengenai sifat dari hak cipta dapat kita lihat pasal 3 Undang-undang hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan (transferable) seluruhnya atau sebagian dengan cara-cara tertentu yaitu:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Dijadikan milik Negara
- e. Perjanjian yang dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta.

Seperti halnya hak-hak lain misalnya gadai, hak hipotek, hak merek, maka hak cipta termasuk jenis benda yang tidak berbentuk. Hal ini untuk dibedakan dengan adanya benda berbentuk misalnya rumah, kendaraan, hewan dan lain-lain.

Hak cipta jika digolongkan ke dalam benda bergerak. Akan menimbulkan pertanyaan “apakah mungkin hak cipta dikuasai orang lain dan berlaku seolah-olah pemiliknya?”. Menurut Saidin, SH hal ini tidak mungkin dan walaupun mungkin hal moral tetap melekat pada si pencipta,

karena sifat kemanunggalannya. Dengan demikian setiap orang akan dapat mengetahui siapa sebenarnya pemilik hak cipta tersebut.⁵⁷

Hak moral yang membedakan hak cipta dengan hak lainnya, ciri khusus ini hanya dimiliki hak cipta. Jika demikian maka dapat dikatakan bahwa isi pasal 3 Undang – undang Hak cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak tepat, karena walaupun hak cipta telah dialihkan kepada pihak lain namun hak moral melekat pada penciptanya. Sehingga hak cipta sebaiknya digolongkan kedalam benda tidak bergerak.

3. Subjek hak cipta

Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau orang yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 butir (b) Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002.

Dalam pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta 2002 mengenai siapa yang dimaksud dengan pencipta adalah :

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman seperti yang dimaksud dalam pasal 29;
- b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Kecuali terbukti sebaliknya pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanyamak orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya.⁵⁸

⁵⁷ OK Saidin, *Op.Cit*, h.38

⁵⁸ Republik Indonesia, *Op.Cit* pasal 5

Subjek Hak cipta adalah pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak cipta. Yang dimaksud dalam pencipta harus memiliki kualifikasi tertentu, agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik Hak cipta.

Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu, dianggap dialah yang memiliki Hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain. Dalam konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan.

Dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, dibedakan subjek hukum hak cipta ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu Pencipta dan Penerima Hak cipta. Bagi pencipta maupun penerima hak cipta menurut undang-undang hak cipta tersebut, mereka itulah yang disebut dengan 'Pemegang Hak cipta'.

Dalam hal seseorang yang menciptakan dalam statusnya sebagai karyawan dari suatu lembaga swasta dalam rangka hubungan kerja, maka pihak pencipta adalah pemegang hak cipta, kecuali ditentukan lain dalam pasal 8 ayat (3) Undang-undang No 19 Tahun 2002. Selain itu juga pasal 9 UUHC Tahun 2002 menjelaskan :

“Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dia dengan tidak menyebut seseorang sebagai pencipta, maka

badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya”⁵⁹

4. Ciptaan yang Dilindungi

Yang dilindungi hak cipta adalah hasil dari penciptanya atau yang disebut dengan karya cipta. Karya cipta adalah hasil setiap pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Untuk itu didalam Undang-undang Hak cipta No 19 Tahun 2002, telah diadakan perubahan yaitu pasal 12 yang meliputi :

- a. Buku, program komputer, pamphlet, susunan perubahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantonim
- f. Karya pertunjukan
- g. Karya siaran
- h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.
- i. Arsitektur
- j. Peta.

⁵⁹ Republik Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 9

- k. Seni batik
- l. Fotografi
- m. Sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.⁶⁰

Menurut penjelasan perubahan ini hanya merupakan penataan ulang dari rumusan mengenai jenis-jenis ciptaan yang termasuk dalam lingkup hak cipta. Telah dikelompokkannya sesuai dengan jenis dan sifat ciptaanya. Dan yang dilindungi oleh hak cipta ialah haknya, bukan benda yang menjadi perwujudan hak tersebut.

5. Pemegang Hak cipta

Yang dimaksud dengan pemegang Hak cipta adalah, pencipta sebagai pemilik Hak cipta atau orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Hak cipta Nomor 19 Tahun 2002 bahwa Pemegang Hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Jika dikaitkan dengan Hak cipta, maka yang menjadi subjeknya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 3 Undang-undang Hak cipta ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah,

⁶⁰. Republik Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 11

wasiat, dijadikan milik negara atau dengan perjanjian, sedangkan yang menjadi objek ialah benda yang dalam hal ini adalah Hak cipta, sebagai benda immateril.

Hak cipta sebagai Hak Milik dalam penggunaannya harus pula dilandaskan atas fungsi sosial. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang Hak cipta Nomor 19 Tahun 2002, menyebutkan bahwa undang-undang ini selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan dimaksud.

6. Sistem Pendaftaran Hak cipta

Selama orang lain tidak dapat membuktikan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-undang Hak cipta No. 19 Tahun 2002 Pasal 11, maka pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya dengan mutlak. Dalam penjelasan umum Undang-undang Hak cipta disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran Hak cipta.

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-undang Hak cipta No. 19 tahun 2002 dinyatakan bahwa pendaftaran Hak cipta Program Komputer (*Software*) dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak cipta Program Komputer. Pendaftaran

ini tidak mutlak diteruskan, karena tanpa pendaftaran Hak cipta Program Komputer dilindungi. Hanya mengenai ciptaan atas suatu Program Komputer yang tidak didaftarkan akan sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya. Pengaturan pendaftaran ciptaan dalam Undang-undang Hak cipta yang pelaksanaan administrasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI, pada dasarnya tidak merupakan keharusan, melainkan hanya bersifat fasilitas.

Status dan fungsi pendaftaran ciptaan Program Komputer (*Software*) pada dasarnya lebih merupakan pencatatan data dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti awal kepemilikan Hak cipta itu. Mengingat Undang-undang Hak cipta telah menyediakan aturannya dan negara telah pula menyiapkan pelayanan administrasi pendaftarannya, rasanya para pencipta perlu lebih didorong untuk mendaftarkan ciptaannya. Terutama untuk dapat memperoleh bukti awal bagi pemilikan Hak cipta itu sendiri.

Akhirnya ketentuan Pasal 44 Undang-undang Hak cipta menyebutkan tentang hapusnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran. Hal ini dapat dikarenakan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak.

7. Pembatasan dan Masa Berlakunya Hak cipta

Sejarah perkembangan Hak cipta di Indonesia, pada umumnya sama dengan negara-negara yang tumbuh dan berkembang, sangat terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Namun landasan dasarnya tetap

tidak berubah. Pada Undang-undang Hak cipta Nomor 6 Tahun 1982 25 (dua puluh lima) tahun, dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 mengenai hal ini kembali mengalami perubahan, dan jangka waktu yang dipakai menjadi 50 (lima puluh) tahun.

Hak cipta jika dilihat sepintas lalu adalah merupakan hak milik absolut dari si pencipta atau si pemegang hak, namun sifat kemutlakannya itu berkurang setelah adanya pembatasan terhadap pemilikan Hak cipta.

Sebenarnya mengenai pembatasan jangka waktu Hak cipta adalah merupakan penjelamaan dari pandangan tentang hakekat pemilikan dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk bermasyarakat, dimana hak milik itu dianggap mempunyai fungsi sosial. Sampai pada batas tertentu memang Hak cipta itu dimaksudkan untuk memperhatikan keseimbangan umum (masyarakat luas). Dua kepentingan ini tidak dipisahkan, oleh hukum pengakuan milik perorangan dan milik umum diakui, karena itu dapatlah dimengerti bahwa pembatasan jangka waktu Hak cipta itu merupakan pertimbangan atas milik umum dan milik individu (perorangan), antara kepentingan individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan atau dengan lainnya.

Sama dengan pemberian hak milik terhadap benda berwujud, pemberian hak milik terhadap hak cipta yang bersifat tidak berwujud juga mendapatkan pembatasan-pembatasan sehingga pengertian hak milik dalam pengertian yang mutlak memang tidak dikenal lagi jaman sekarang ini. Dengan pembatasan ini diharapkan akan terjadi keseimbangan antara

kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Kepentingan pencipta adalah mendapatkan keuntungan komersil dari ciptaanya, sedangkan kepentingan masyarakat adalah mendapat kemudahan informasi.

Ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan bagi Program Komputer (*Software*) yang dilindungi sebagai karya tulis atau *literary work* menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 menjadi selama 50 (lima puluh) tahun. Banyak yang berpandangan dengan perpanjangan waktu itu Undang-undang Hak cipta yang sekarang ini semakin individualis, namun disisi lain perlu untuk menjamin atau melindungi kepentingan pencipta. Program Komputer (*Software*) secara tegas diberikan perlindungan seperti diketahui terutama Amerika Serikat yang selalu mendesak negara-negara berkembang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik berkenaan dengan Program Komputer (*Software*).